

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung Melalui Collaborative Governance (Studi Pada Taman Ganesha)

Achmad Raihan Hidayat

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
amedhraihaan23@gmail.com

Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Pemanasan global erat kaitannya dengan kualitas lingkungan. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas lingkungan adalah penataan ruang. Menurut Dirjen Cipta Karya dan Pekerjaan Umum penyediaan ruang terbuka hijau diperkotaan dapat berbentuk taman kota yang dibuat menggunakan konsep *green city*. Taman Ganesha adalah taman yang ada di Kota Bandung dimana dalam pembangunannya terdapat kolaborasi antar institusi, baik itu dari pemerintah, masyarakat serta pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder. Fokus penelitian yang digunakan adalah model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007:550). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data menurut Krippendorff. Pada Kondisi awal terdapat tiga indikator yaitu sumberdaya, keuntungan dan hambatan serta riwayat kerjasama. Bentuk kepemimpinan fasilitatif ditunjukkan oleh Kepala Dinas DPKP3, Rektor ITB beserta jajaran staff di bidang sarana dan prasarana selaku penguasa dan pengelola taman. Bentuk kelembagaan tertuang dalam aturan yang berlaku. Pada proses kolaborasi yang dilakukan terdapat empat tahapan diantaranya a) *face to face dialogue*; b) *trust building*; c) *commitmen to process*; d) *shared understanding*. Pada tahap pertama proses kolaborasi terdapat dialog tatap muka diprakarsai Pemerintah Kota Bandung melalui DPKP3. Tahap Membangun kepercayaan tercermin dari Pemerintah Kota Bandung melalui DPKP3 selaku fasilitator. Selanjutnya para pihak saling berkomitmen dalam mengelol Taman Ganesha sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Hasil yang didapat dari terciptnya kolaborasi ini adalah Taman Ganesha berperan dalam peningkatan fungsi ekologis dan fungsi rekreasi bagi sebuah taman kota.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Abstract

Global warming is closely related to environmental quality. One aspect that must be considered in improving environmental quality is spatial planning. According to the Director General of Human Settlements and Public Works the provision of green open spaces in cities can be in the form of urban parks that are made using the concept of green city. Taman Ganesha is a park in the city of Bandung where in its development there is collaboration between institutions, both from the government, the community and third parties. This type of research is a qualitative descriptive study with secondary data sources. The focus of research used is a collaborative governance model according to Ansell and Gash (2007: 550). The data collection technique used is the documentation technique. The data analysis technique used is the data analysis technique according to Krippendorff. In the initial conditions there are three indicators namely resources, benefits and constraints as well as a history of cooperation. The facilitative form of leadership was shown by the Head of the DPKP3 Office, the Rector of ITB along with the

staff in the field of facilities and infrastructure as the authorities and park managers. The institutional form is contained in the applicable rules. In the collaboration process, there are four stages including a) face to face dialogue; b) trust building; c) commitment to process; d) shared understanding. In the first stage of the collaboration process there was a face-to-face dialogue initiated by the Bandung City Government through the DPKP3. The phase of building trust is reflected in the Bandung City Government through DPKP3 as the facilitator. Furthermore, the parties are committed to managing each other in the Ganesha Park in accordance with applicable rules and agreements. The results obtained from the creation of this collaboration is that Ganesha Park plays a role in enhancing the ecological and recreational functions of a city park.

Keywords: Collaborative Governance, Provision of Green Open Space

PENDAHULUAN

Sebagai negara tropis, Indonesia diketahui terletak diantara dua benua dan dua samudera. Letak astronomis dan geografis Indonesia hanya memiliki dua musim setiap tahunnya. Pada umumnya Wilayah di Indonesia memiliki suhu udara yang hangat. Namun, dewasa ini dunia sedang dihadapkan dengan fenomena pemanasan global. Seluruh negara manapun di dunia mengalaminya tidak terkecuali Indonesia.

Menurut Shahzad (2015:1) penyebab dari pemanasan global adalah meningkatnya produksi gas emisi serupa: *carbon dioxide, methane, chlorofluoro carbon dan nitron oxide*. Suhu permukaan bumi akan bertambah panas serta berbanding lurus dengan meningkatnya konsentrasi gas emisi.

Dikutip dari laman berita online BBC Indonesia (BBC:2019), hingga tahun 2023 diprediksi akan menjadi dekade terpanas dalam 150 tahun terakhir dengan peningkatan suhu sebesar 1,5 derajat celcius. Kenaikan temperatur ini berakibat pada perubahan ekstrim di berbagai belahan bumi lainnya. Perekonomian dan ekosistem diberbagai negara dengan jutaan orang didalamnya akan terdampak oleh cuaca ekstrim tersebut. Pemanasan global erat kaitannya dengan kualitas lingkungan. Banyak yang dirugikan dengan semakin memburuknya kualitas lingkungan, terutama masyarakat terdampak. Pemerintah harus tegas dalam menangani isu penurunan kualitas lingkungan hidup dikarenakan isu tersebut berkaitan dengan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan urgensi negara-negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri ada payung hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup yakni Undang-Undang No.32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penataan ruang yang baik juga menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan sebelumnya. Penataan ruang yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No.26 tahun 2007 pasal 29 ayat 2 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau bahwa luas seluruh wilayah perkotaan haruslah tersedia 30% proporsi ruang terbuka hijau.

Penyediaan ruang terbuka hijau diperkotaan dapat berbentuk taman kota yang dibuat menggunakan konsep *green city*. Dalam situs resmi (Ciptakarya:2020) yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan pekerjaan umum, termuat delapan parameter *green city*, diantaranya a) *green planning and design*; b) *green open space*; c) *green energy*; d) *green water*; e) *green waste* f) *green building*; f) *green building*; g) *green community*.

Jumlah peserta program *green city* diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya dan Pekerjaan Umum berjumlah 32 dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kalimantan Utara dan Papua Barat merupakan provinsi yang tidak mengikuti program tersebut. Peserta terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 24 kabupaten/kota. Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan jumlah peserta sebanyak 12 kabupaten/kota. Sementara itu di peringkat ketiga ada provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta terbanyak sebanyak 11 kabupaten/kota.

Di Indonesia salah satu kota yang menerapkan konsep *green city* berkaitan dengan penyediaan lahan atau *green open space* adalah Kota Bandung. Menyediakan ruang terbuka hijau di sudut kota merupakan upaya penghijauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Merevitalisasi kota.kembali taman-taman kota dan mengembangkan taman kota pada lahan yang belum terbangun merupakan langkah awal yang dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.07 tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Bandung khususnya taman memang sedang gencar dilakukan. Dari jumlah keseluruhan 30 kecamatan di Kota Bandung, jumlah taman mencapai 2248 taman yang terdiri dari taman kota hingga taman di area perumahan. Selain data jumlah taman yang ada, Kota Bandung memiliki 23 taman tematik yang terletak di pusat kota. Rencana penyediaan taman yang memiliki tema khusus ini terdapat pada Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung tahun 2012-2032 pada kegiatan peningkatan luas/kuantitas RTH publik. Indikasi program yang disebutkan adalah pengembangan taman-taman tematik pada beberapa lokasi yang telah disepakati dalam wilayah Gedebage, Nagrog, Pasir Impun, dan Cicabe. Lokasi yang telah diarahkan pada masterplan RTH tersebut tidak sesuai dengan apa yang diimplementasikan karena pembangunan taman tematik terfokus di SWK (SubWilayah Kota) Cibeunying.

Tabel 1.1
Penyediaan RTH di Kota Besar di Indonesia

No	Kota	Presentase
1	Semarang	61,94%
2	Balikpapan	37,40%
3	Surabaya	21,79%
4	Makassar	13,0%
5	Bandung	12,15%
6	Jakarta	9,98%
7	Medan	7,0%

Sumber: Dari berbagai sumber (2019)

Pembangunan taman secara besar-besaran ternyata belum mampu memenuhi proporsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang yakni 30%. dari 7 kota besar, Kota Bandung berada di peringkat 5 dengan persentase ruang terbuka hijau sebesar 12,15%. Bandung masih kalah dengan Kota Makassar, Kota Surabaya, Kota Balikpapan dan Kota Semarang.

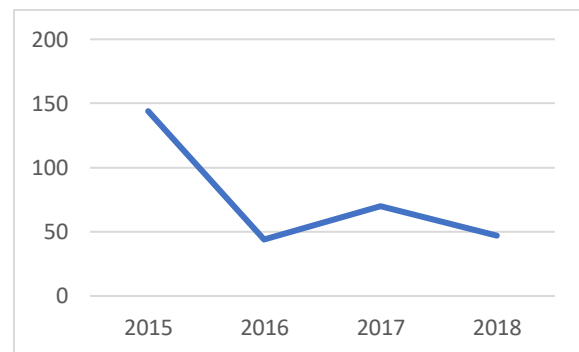
Besarnya tekanan pertumbuhan seperti pembangunan gedung dan penambahan jalur

kendaraan saat ini lebih diprioritaskan. Selain sering merubah konfigurasi alami atau bentang alam, pembangunan perkotaan juga menyita lahan dan mengubah berbagai bentukan ruang. dikutip dari portal berita online republika.co.id (Ridwan,Muhammad:2019), ada wacana pemerintah Kota Bandung untuk membongkar taman dan dijadikan jalur untuk kendaraan.

Penyediaan ruang terbuka hijau melalui *collaborative governance* di Kota Bandung merupakan salah satu solusi untuk memenuhi standar penerapan *green city* dimana didalamnya terdapat *green open space* sebagai indikator penerapan konsep *green city* pada suatu kota. Tentu untuk mencapai target 30% ruang terbuka hijau, dibutuhkan berbagai elemen ataupun institusi baik dari pemerintah, masyarakat dan swasta.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung berperan selaku pelaksana penyediaan ruang terbuka hijau. Ada beberapa kondisi dimana pemerintah tidak dapat bekerja sendiri seperti anggaran yang terbatas, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung mulai menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga.

Grafik 1.1
Kerjasama Pemerintah Kota Bandung Bidang Lingkungan



Sumber: Dataset Kota Bandung (2018)

Berdasarkan Dataset Kota Bandung tahun 2015-2018. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan kerjasama dalam bidang lingkungan sebanyak 305 kerjasama dengan rincian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 44 kerjasama. Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 70 kerjasama dan tahun 2018 sebanyak 47 kerjasama. Pembangunan fasilitas secara keseluruhan ataupun penyediaan fasilitas tertentu seperti air mancur, wifi, wahana bermain anak dan tempat berolahraga

merupakan bentuk keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan bidang lingkungan.

Di Kota Bandung, taman kota merupakan suatu warisan sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan. Menurut Sistaningrum dkk (2010:1) Taman-taman ini selain memiliki nilai sejarah, juga memiliki fungsi yang sangat vital sebagai paru-paru kota. Perannan taman kota di Bandung selain sebagai *urban park* juga memiliki peranan penting didalam ekologi pemukiman masyarakat kota untuk berbagai faktor, diantaranya sebagai penyaring udara, konservasi air, area sinar matahari, tempat tinggal hewan, dan tempat rekreasi bagi masyarakat.

Kenyamanan serta keindahan taman ditentukan oleh pepohonan didalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan bahwa pepohonan di taman kota berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. Pepohonan ditanam secara berkelompok atau menyebar serta pohon yang harus dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam. Dari observasi yang telah peneliti lakukan, hampir semua taman kota telah mengikuti peraturan tersebut.

Gambar 1.1
Ijzerman Park



Sumber: *Tropenmuseum* (2020)

Taman Ganesha merupakan taman dengan jumlah pohon memadai. Pada zaman kolonial Belanda, perkembangan pesat Kota Bandung membuat Pemerintah Kota Bandung pada masa itu berupaya untuk menerapkan konsep *garden city*. Dahulu dinamai “*Ijzerman Park*” karena Taman Ganesha dibangun untuk mengenang jasa seorang tokoh pendiri ITB, Dr. Ir. J.W. Ijzerman. Tidak hanya menyerap polusi kota, fungsi Taman Ganesha juga untuk memberi udara segar di antara rutinitas harian masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilakukan mengukuhkan Taman Ganesha sebagai ruang terbuka public di Kota Bandung.

Tempat berkumpulnya masyarakat dengan berbagai kegiatan (bermain, membaca, makan, sekedar duduk, berjualan) merupakan gambaran Taman Ganesha dari pengamatan penulis. Dilihat dari lokasinya yang berdekatan dengan pemukiman dan institusi pendidikan, Taman Ganesha cukup dimanfaatkan sebagai ruang terbuka publik area bertemunya masyarakat juga bagi mahasiswa/pelajar untuk beraktivitas, selain fungsi utamanya sebagai paru-paru kota. Kegiatan yang ada di Taman Ganesha dipengaruhi oleh beberapa area di seputaran taman seperti, Kampus ITB, Masjid Salman, Kebun Binatang Bandung, *Food Court* Gelap Nyawang dll. Taman Ganesha mendapatkan dampak positif dari area disekitarnya.

Soft space atau elemen lunak pada Taman Ganesha berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari, peredam suara kebisingan, menjaga kelembapan serta sebagai dekorasi alami taman yang membuat keindahan Taman Ganesha menjadi lebih indah. Ada beberapa jenis pohon yang terdapat dan tumbuh di area taman, yaitu pohon pengarah dan pohon peneduh. Pohon pengarah salah satunya pohon Palm Bajing sedangkan pohon peneduh salah satunya pohon *Pelicionium* dll.

Secara institusional, penyedia ruang terbuka hijau khususnya taman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung (DPKP3), namun khusus Taman Ganesha, pengelola taman adalah Institut Teknologi Bandung yang dalam pengelolaannya tetap bertanggung jawab pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung. Selain itu peran masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau ini sebatas pemanfaatan taman yang dimana dalam hal ini masyarakat dapat ikut serta menjaga dan merawat taman yang ada di Kota Bandung, khususnya Taman Ganesha

Penelitian terdahulu yang terdapat pada penelitian ini bersumber dari skripsi dan jurnal. Adapun skripsi dan jurnal tersebut yakni jurnal karya Helen Morales dan Jack Meek “*Models of Collaborative Governance : The City of Los Angeles Foreclosures Registry Program*” tahun 2019 yang berfokus pada fokus jaringan menurut Goldsmith dan Eggers (2004) yaitu a) *network design*; b) *policy learning*; c) *selection of members*; d) *network management*; e) *ensuring innovation*. Selanjutnya ada skripsi karya Andriani berjudul “*Collaborative Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong*” tahun 2019 yang berfokus pada tahapan *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) yaitu a) *starting condition*; b) *facilitative leadership*; c) *institutional design*; d) *collaborative*

process. Terakhir, peneliti merujuk penelitian terdahulu melalui jurnal ilmiah karya Ipik Permana dan Mohamad Taufik Hidayat berjudul “*Collaborative Governance in Development and Empowerment of Street Vendors in Cirebon City*” tahun 2020 yang berfokus pada tahapan *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) yaitu a) *starting condition*; b) *facilitative leadership*; c) *institutional design*; d) *collaborative process*.

Revitalisasi dan pembangunan taman di Kota Bandung nyatanya belum berdampak maksimal pada peningkatan persentase ruang terbuka hijau yang masih berkisar pada angka 12,15% dan belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Selain itu kurangnya ruang terbuka hijau diimbangi dengan menurunnya kerjasama dengan pihak ketiga pada bidang lingkungan. Berkaca pada latar belakang permasalahan diatas maka penelitian ini memiliki fokus dan bertujuan untuk mengkaji bagaimana kolaborasi antar instansi yang dituangkan kedalam judul skripsi penelitian “Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung melalui *Collaborative Governance* (studi pada Taman Ganesha)”. Bagaimana hasil dari proses *collaborative governance* melalui penelitian ini bisa dijadikan rujukan ataupun referensi bagi instansi terkait yang berkenaan dengan penyediaan ruang terbuka hijau bukan hanya di Kota Bandung.

METODE

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung (Studi Pada Taman Ganesha), khususnya kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Institut Teknologi Bandung (ITB) beserta masyarakat pengunjung Taman Ganesha Kota Bandung. Fokus penelitian yang digunakan adalah model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007:550) yaitu *starting condition*, *facilitative leadership*, *institutional design*, *collaborative process*. Objek penelitian ini adalah Taman Ganesha yang terletak di Jl. Ganesa, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Peneliti akan melakukan deskripsi berdasarkan data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah, data instansi yang dipublikasikan, surat kabar online, serta peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka hijau melalui *collaborative governance* khususnya di Taman Ganesha. Artikel diperoleh dari jurnal bertaraf internasional seperti *Journal of Public Administration Research and Theory*, *Public Personnel Management*, *SAM Advances Management Journal*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *Zurich Open Repository and Archive*, *Administration in Social Work*, *Journal of Management* dan *Journal Of Public Sector Innovation*. Data instansi yang ada didalam artikel ini diperoleh dari laman resmi Pemerintah Kota Bandung, DPKP3, serta ITB. Pengkajian berbasis pada 18 artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian, seperti: catatan, transkrip, buku, surat kabar dan data lainnya yang berkaitan dengan *collaborative governance*. Teknik analisis data yang peneliti gunakan merupakan teknik analisis data menurut Krippendorff (2018:33) yaitu analisis konten isi dengan cara membandingkan informasi mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat hasil data yang penulis peroleh dari analisis terhadap sumber data sekunder berupa jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka hijau melalui *collaborative governance*, sebelum ke pembahasan alangkah lebih baiknya mengingat kembali fokus penelitian ini adalah menganalisis penyediaan ruang terbuka hijau melalui model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007). Model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash yaitu *starting condition*, *facilitative leadership*, *institutional design*, *collaborative process*.

1. *Starting Condition*

Kondisi awal yang meliputi sumberdaya, kesamaan visi misi dan tujuan serta manfaat akan mempengaruhi pihak-pihak yang akan berkolaborasi. Kondisi awal merupakan entry poin dalam pelaksanaan kolaborasi selanjutnya. Menurut Harmawan (2017:51) pada jenjang keadaan awal antar stakeholders, para pelaku memiliki latar dan urgensi berbeda yang dapat mewujudkan sebuah kerangka jaringan asimetris dalam pertalian yang dijalankan. Menurut Carayannis dan Campbell dalam Imron (2020:71) Seluruh aktor yang ada secara cerdas saling berinteraksi dengan efektif dan efisien.

Menurut Ansell dan Gash (2007:550) terdapat tiga indikator yang dapat dijadikan acuan dalam *starting condition* yaitu sumberdaya, hambatan, dan riwayat kerjasama. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga indikator tersebut:

a. Sumber daya

Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang bertugas untuk mengelola taman di Kota Bandung adalah Diskamtan yang pada tahun 2017 direorganisasi menjadi Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3). Menurut Widyahantari dan Rudiarto (2018:14) bidang pertamanan dibagi menjadi tiga bagian yakni bagian pengembangan taman, bagian pemeliharaan taman serta pembangunan taman. Dalam Rencana Strategis Diskamtan tahun 2013-2018 disebutkan bahwa salah satu persoalan kelembagaan yang dihadapi adalah jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan kurang berkompeten dengan jumlah pegawai sebanyak 284 pegawai negeri sipil dan 234 tenaga magang. Hal tersebut diatasi dengan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini pengelolaan Taman Ganesha.

Dalam mengelola sarana dan fasilitasnya, Institut Teknologi Bandung menunjuk Direktorat Sarana dan Prasarana sebagai pemeliharaan dan pengelolaan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Rektor ITB No.189/PER/Ii.A/SP/2018 tentang sistem pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana Institut Teknologi Bandung perguruan tinggi badan hukum. Menurut SK Rektor No.342/SK/Ii.A/KP/2015 Direktorat Sarana dan Prasarana memiliki tiga subdit dan sembilan seksi. Tiga subdit yang ada yakni subdit pendayagunaan aset dan inventarisasi, subdit operasional dan kebersihan serta subdit perawatan aset. Sembilan seksi dibawahnya yakni seksi inventarisasi aset, seksi pendayagunaan aset, seksi penghapusan aset, seksi penerimaan dan distribusi, seksi kebersihan dan pengelolaan sampah, seksi operasional dan kebersihan gedung, seksi perawatan gedung, seksi perawatan utilitas dan seksi transportasi. Laman resmi Direktorat Sarana dan Prasarana ITB (ITB:2020) jumlah pegawai yang dimiliki adalah 178 dengan rincian 15 pimpinan, 96

pegawai negeri sipil dan 57 pegawai badan hukum milik negara.

Menurut Widyahantari dan Rudiarto (2018:14) masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga kebersihan taman dengan merekrut mereka menjadi tenaga kebersihan yang disebut sebagai Gobar (*Go-Kebersihan*).

b. Keuntungan dan hambatan

Bentuk keuntungan yang didapat oleh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung berupa meningkatnya kepercayaan publik, terhadap instansi terkait, umumnya kepada pemerintah. Selain itu pekerjaan lebih terkoordinasi dengan baik dan upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat melalui penyediaan ruang terbuka hijau dapat tercapai.

Bentuk keuntungan yang didapat pihak ketiga dalam hal ini Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah mampu membentuk citra positif universitas sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia, mengamalkan tri darma perguruan tinggi yakni pengabdian masyarakat, meningkatkan kepercayaan stakeholders lainnya dalam hal ini Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) sebagai penanggung jawab penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

Keuntungan yang diperoleh masyarakat menurut Sintaningrum dkk (2010:15) dengan merekrut masyarakat menjadi petugas kebersihan maka mempersempit kesempatan oknum untuk melakukan penyimpangan.

Bentuk tekanan yang ada dalam proses kolaborasi menurut Ulfa (2018:9) adalah belum tercapainya target kawasan RTH Kota Bandung, menyokong visi Kota Bandung dan represi dari peraturan kebijakan mengenai tata ruang.

c. Riwayat kerjasama

Penyediaan dan pengelolaan taman-taman di Kota Bandung awalnya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan pihak lain. Menurut Widyahantari dan Rudiarto (2018:11) pola ini memiliki kekurangan terutama dalam hal anggaran. Penyediaan fasilitas publik dengan kolaborasi sangat membantu dalam pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

Gambar 1.2
Taman Ganesha



Sumber: Dokumentasi pribadi (2020)

Tidak terdapat ketentuan teknis yang mengatur secara khusus dalam penyediaan ruang terbuka hijau khususnya Taman Ganesha karena Taman Ganesha merupakan taman yang dibangun tahun 1919 untuk mengenang jasa pendiri ITB yaitu Dr. Ir. J.W. Ijzerman. Rencana penyediaan taman terdapat pada Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung 2012-2032 yakni pada kegiatan peningkatan luas/kuantitas RTH publik. Penyediaan taman tematik termasuk dalam program prioritas walikota yang tertuang dalam misi pertama yakni “Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman”. Dalam RPJMD dinyatakan bahwa target penyediaan taman tematik selama 5 tahun adalah sebanyak 21 buah. Target yang terdapat pada RPJMD tersebut kemudian digunakan sebagai acuan RENSTRA pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD penanggung jawab penyediaan dan pengelolaan taman tematik yakni Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang pada tahun 2017 di restrukturisasi menjadi DPKP3.

Tuturan kerjasama antara SKPD Kota Bandung dengan pihak ketiga dikatakan memiliki tuturan yang cukup baik, dikarenakan korespondensi yang terjalin menunjukkan kelancaran serta terkoordinir cukup apik. Tuturan kerjasama yang baik ini akan membentuk sebuah keadaan yang menguntungkan dalam penyediaan ruang terbuka hijau melalui *collaborative governance*. Riwat kerjasama yang pernah dilakukan sebelumnya antara Pemerintah Kota Bandung dan ITB salah satunya adalah desain alun-alun cicendo.

Gambar 1.3
Alun-Alun Cicendo



Sumber: Tribunnews.com (2020)

2. *Facilitative Leadership*

Penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung didukung oleh kepemimpinan fasilitatif. Menurut Ansell dan Gash (2007:557), kepemimpinan fasilitatif adalah upaya pemimpin yang berperan sebagai orang yang dapat merangkul, memberdayakan serta melibatkan semua unsur yang terlibat agar proses kolaborasi dapat berjalan baik. Salah satu hal yang penting dari *facilitative leadership* adalah usaha untuk memberdayakan unsur-unsur tertentu. Menurut Patzer dkk (2018:15) kepemimpinan fasilitatif dapat menjembatani kepentingan dari berbagai stakeholders melalui komitmennya dengan melakukan komunikasi dan dialog tetapi harus tetap sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu menurut Suryono dalam Fanani (2020:86) pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang terus-menerus membuktikan bahwa ia mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain, lebih dari kemampuan orang lain untuk mempengaruhi dirinya. Dalam penyediaan ruang terbuka hijau ada dua pemimpin dari dua instansi yang terlibat aktif yakni Kepala DPKP3 dan Rektor ITB.

Kepala DPKP3 Kota Bandung merupakan salah satu kepala dinas yang berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau khususnya taman di Kota Bandung. Menurut Kim dalam Dahlstrom (2013:443) bentuk komitmen dari seorang pemimpin adalah meraih kepercayaan berbagai pihak untuk memenuhi tujuan organisasi. Selain itu, bekerja keras mengelola sumberdaya yang ada dalam organisasi. Menurut Peraturan Walikota Bandung No. 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja DPKP3 Kota Bandung , uraian tugas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka hijau melalui *collaborative governance* adalah melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat atau instansi lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Institut Teknologi Bandung (ITB) selaku pengelola Taman Ganesha dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No.189/PER/Ii.A/SP/2018 tentang sistem pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana Institut Teknologi Bandung perguruan tinggi badan hukum menyatakan bahwa penguasa sarana dan prasarana adalah Rektor ITB yang dalam pelaksanaannya menunjuk Direktorat Sarana dan Prasarana dan dipimpin oleh seorang direktur. Melalui SK Rektor No. 342/SK/Ii.A/KP/2015 tentang tugas pokok dan fungsi menunjuk kepala Subdit Operasional. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, Subdit Operasional dan Kebersihan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman yang bersifat teknis. Sementara dalam hal manajemen sarana dan prasarana ITB dipimpin oleh direktur sarana dan prasarana.

3. *Institutional Design*

Menurut Syukuri dalam Aneta (2018:84) pemerintah melakukan fungsi regulasi dan implementasi pada saat yang sama. Proses kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau melalui *collaborative governance* (studi pada taman ganesha) memiliki partisipasi yang cukup kuat dari berbagai pihak dan tentunya memiliki aturan dasar yang jelas mengatur pada setiap proses kolaborasi yang dilakukan. Menurut Reilly (2001:56) partisipasi yang luas tidak hanya dimanifestasikan dalam kehadiran saja tetapi juga harus secara aktif. Partisipasi adalah jantung dari legitimasi proses kolaborasi berdasarkan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk membicarakan dengan orang lain tentang hasil-hasil kebijakan dan klaim bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus berbasis luas. Aturan dasar yang digunakan dalam menjalankan proses kolaborasi yang ada diantaranya, Perda Kota Bandung No.13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Forum tersebut merupakan sebuah forum kerjasama yang digagas oleh Walikota

Bandung melalui Keputusan Walikota Bandung No. 536/Kep.609-Ek/2018 Kota Bandung perlu memiliki forum tanggung jawab sosial dalam membantu walikota dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan daerah.

Namun forum ini adalah forum bersama. Belum ada forum khusus antara DPKP3 dengan ITB. Dalam penyediaan dan pemeliharaan, kedua instansi memiliki aturan internal didalam institusinya masing-masing. Kedua instansi memiliki pembagian kerja yang berbeda. Dalam pembangunan dan pemeliharaan taman secara umum DPKP3 mengacu pada Peraturan Walikota Bandung No. 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPKP3 Pasal 26 didalamnya tertulis bagian pertamanan memiliki uraian tugas dalam pembangunan taman dan mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pertamanan melalui pola kemitraan.

Apabila DPKP3 berperan dalam pembangunan taman, maka ITB berperan dalam pengelolaan taman sebagai mana tercantum dalam Peraturan Rektor ITB No.189/PER/Ii.A/SP/2018 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbunyi Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB yang menangani sarana dan prasarana mengatur penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana.

Gambar 1.4
Jam Operasional Taman Ganesha



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2020)

Menurut laman resmi ITB (ITB:2020) Direktorat Sarana dan Prasarana ITB sebagai pengelola Taman Ganesha mengeluarkan tata tertib Pemakaian Taman Ganesha yang berisikan prosedur untuk memakai Taman Ganesha karena segala bentuk kegiatan perorangan maupun kelompok harus berdasarkan izin Direktorat Sarana dan Prasarana.

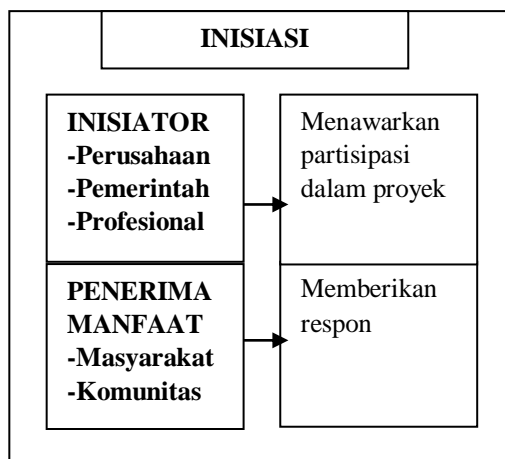
4. Collaborative Process

Setelah tiga fase sebelumnya terlewati, fase selanjutnya adalah ketiga institusi tersebut memulai proses kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau melalui *collaborative governance* dengan melakukan dialog tatap muka sebagai fase awal dalam mewujudkan permufakatan.

a. Face to face dialogue

Menurut Sufianti (2013:135) dialog tatap muka memiliki arti para institusi yang terlibat dalam dialog mampu berbicara mewakili kepentingan kelompoknya, saling menghormati, dan berbicara dengan akurat. Keterlibatan dalam dialog tatap muka bertujuan untuk membahas materi kerjasama tujuan, konsep serta beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka hijau serta menyelesaikan bahasan pokok terkait status dan pemecahan konflik bersama.

Gambar 1.5
Skema Inisiasi



Sumber: Nururrohmah dan Suhirman (2016)

Menurut Widyahantari dan Rudiarto (2018:15) pada face to face dialogue pemerintah

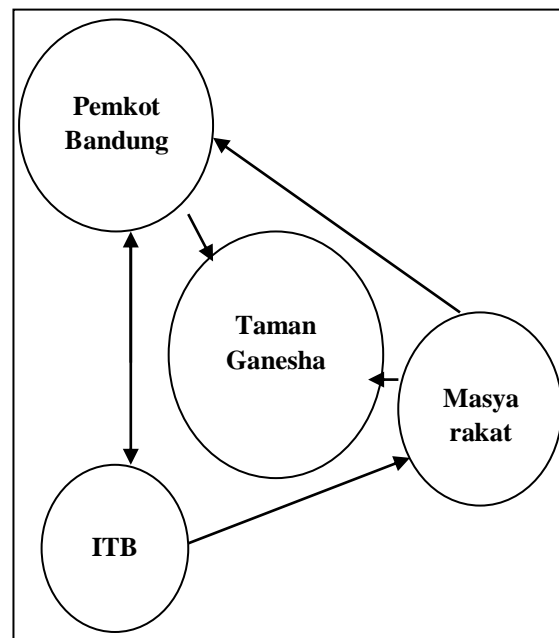
berperan sebagai inisiator. Ide atau konsep taman bersifat *topdown*. Namun saat ini konsep taman mulai melibatkan masyarakat dan komunitas.

Dalam proses kolaborasi penyediaan ruang terbuka hijau melalui *collaborative governance* khususnya taman ganesha, pada tahap pertama proses kolaborasi terdapat dialog tatap muka diprakarsai Dinas Penataan Ruang, Bagian Kerjasama Pemkot Bandung, BAPPELITBANG, DPKP3, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta tidak lupa Institut Teknologi Bandung.

b. Trust Building

Selepas melakukan dialog tatap muka, tahap selanjutnya adalah pelaku kolaborasi membangun kepercayaan satu sama lain melalui partisipasi aktif sebagai syarat awal proses *governance* dapat berlangsung. Menurut Gitsham dan Page (2014:19) sebagai bagian dari proses kolaborasi, antar institusi perlu membuat hubungan yang kuat dan saling percaya diantara para peserta. Hal ini didasari oleh adanya visi bersama diantara para stakeholder yang memungkinkan setiap komponen akan melakukan partisipasi.

Gambar 1.6
Skema Aktor Collaborative Governance



Sumber: Widyahantari dan Rudiarto (2018)

Dari skema tersebut bisa dijelaskan Pemerintah Kota Bandung sebagai supervisor

menginisiasi taman untuk masyarakat. ITB sebagai partner dari pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk pengelolaan serta memberikan public value sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Masyarakat termasuk komunitas didalamnya memiliki hak untuk menggunakan dan berkewajiban memelihara taman yang telah dibangun.

Dalam membangun kepercayaan melalui partisipasi, ITB memiliki peran dalam pengelolaan taman secara operasional yang dimana memiliki tugas untuk mematuhi peraturan yang berlaku sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor ITB No.189/PER/I1.A/SP/2018 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, memberikan laporan kepada DPKP3 tentang perkembangan taman. Hal ini sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.13 tahun tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 6 huruf O yakni peningkatan peran serta perguruan tinggi dan dunia usaha dalam menunjang lifeskill education. Selain itu dari pihak ITB juga rutin menjalankan perawatan taman dan melaporkannya pada DPKP3.

Tabel 1.2
Penilain Persepsi Publik Terhadap
Pengelola

Vegetasi	Tam an Gane sha	Taman Tegall ega	Tam an Lans ia	Taman Balaiko ta
Sangat Baik	0.00	14.94	5.48	14.10
Cukup Baik	50.62	49.43	49.32	47.44
Kurang Baik	49.38	35.63	45.21	38.46
Jumlah (%)	100	100	100	100

Sumber: Sintaningrum, dkk (2017)

Taman Ganesha menunjukkan bahwa persepsi pengunjung mengenai kemampuan pengelola dalam mengelola Taman Ganesha yang tertinggi 50.62% menyatakan cukup baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Setiawan, dkk (2017:78) dengan pengunjung taman, taman tertata rapi, berada di taman merasa nyaman, sejuk, rimbun, dan tenang

c. *Commitment to Process*

Kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau melalui *collaborative governance* (studi pada taman ganesha) melibatkan Pemkot Bandung melalui DPKP3, ITB serta masyarakat. DPKP3 selaku pemegang izin pembangunan taman bekerja sama dengan ITB selaku pemegang izin pengelolaan yang tercatat di dalam Peraturan Rektor ITB No.189/PER/I1.A/SP/2018 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, lalu diperkuat dengan Perwali Kota Bandung Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPKP3 Kota Bandung Pasal 26 ayat 4 Huruf O yakni mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan taman. Dimana dalam hal ini DPKP3 dan ITB bekerja sama dalam pengembangan dan pembangunan Taman Ganesha. Dalam kasus ini jejaring yang ada di antara stakeholder cukup baik. DPKP3 melakukan controlling terhadap kondisi taman, sedangkan dari pihak ITB berupaya menyediakan upaya pendukung taman seperti pedestrian, tangga, papan nama, tempat sampah, sculpture, bangku taman, lampu taman, kolam, shelter (Kustianingrum dkk, 2013:4). Controlling taman dilakukan setiap hari agar keindahan dan kerapihan taman tetap terjaga. Kota Bandung memiliki 320 tenaga harianlepas untuk mengontrol dan memelihara taman (Rosadi:2019).

d. *Share Understanding*

Kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau harus memiliki tujuan yang jelas. Menurut Glasbergen dan Dressen dalam Ansell dan Gash (2007:560) *shared understanding* dapat diartikan dengan adanya tujuan yang jelas dari kolaborasi tersebut. Pemerintah melalui DPKP3, ITB serta masyarakat menjalin kemitraan antara ketiga sektor. Padaumumnya kemitraan ketiga sektor tersebut terjadi karena dorongan oleh

pencampuran antara motif ketertarikan dengan tujuan untuk mengkonfigurasi ketertarikan bersama (Selsky dan Parker, 2006:861). Selain berperan dalam menciptakan ruang terbuka hijau di Kota Bandung, Taman Ganesha juga berperan dalam peningkatan fungsi rekreasi dan fungsi ekologis bagi sebuah taman.

Fungsi rekreasi Taman Ganesha merupakan wadah bagi masyarakat untuk bergerak aktif dalam ruang terbuka. Seperti diketahui Taman Ganesha dijadikan tempat beraktivitas oleh masyarakat, mahasiswa, ataupun komunitas disekitar lingkungan taman tersebut.

Gambar 1.7
Aktivitas Masyarakat di Taman Ganesha



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2020)

Menurut Andrahan dkk (2012:10) fungsi ekologis berperan meningkatkan atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu perkotaan, dan meredam kebisingan. Upaya Kota Bandung dalam meningkatkan persentase ruang terbuka hijau tercermin dari vegetasi yang ada di Taman Ganesha menurut persepsi publik. Berkat pengelolaan yang baik, Taman Ganesha memiliki tingkat vegetasi yang tinggi.

Gambar 1.8
Pepohonan Taman Ganesha



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2020)

Vegetasi atau pepohonan taman kota yang harus dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. Hampir semua taman kota yang menjadi objek kajian sudah mengikuti kaidah sesuai peraturan tersebut, sayangnya beberapa taman masih memiliki pohon termasuk golongan *evergreen* bukan dari golongan tanaman yang menggugurkan daun (Setiawan, dkk 2017:78)

Tabel 1.3
Tingkat Vegetasi Taman Ganesha

Vegetasi	Taman Ganesha	Taman Tegallaga	Taman Lansia	Taman Balaikota
Sangat Baik	32.10	24.14	15.07	38.46
Cukup Baik	59.26	67.82	78.08	42.31
Kurang Baik	8.64	8.05	6.85	19.23
Jumlah (%)	100	100	100	100

Sumber: Sintaningrum, dkk (2017)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa vegetasi (pepohonan) yang ada pada Taman Ganesha memberikan kenyamanan yang cukup tinggi. Dalam tabel tersebut menurut persepsi publik yang mengunjungi Taman Ganesha, sebanyak 59.26% (48 orang) menyatakan cukup baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengunjung taman, tinggi pepohonan cukup baik, teduh dan menenangkan, pohon-pohonnya relatif masih terjaga subur, banyak sekali pepohonan, membuat taman menjadi teduh, rindang, menenangkan, sejuk, rimbun dan memberikan keindahan pada taman. Namun demikian menurut 8.64% (7 orang) responden mengatakan ada beberapa penanaman pohon yang kurang memperhitungkan arah matahari, dan kurang terurus (Sintaningrum, dkk 2017:6).

PENUTUP

Simpulan

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung melalui *Collaborative Governance* (Studi Pada Taman Ganesha) dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui DPKP3 dan beberapa dinas SKPD pendukung lainnya seperti BAPPELITBANG, Dinas Penataan Ruang, Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset, Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Bandung, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kota Bandung serta Institut Teknologi Bandung (ITB) dan masyarakat. Pada Kondisi awal terdapat tiga indikator kesiapan yaitu sumber daya, keuntungan dan hambatan, serta riwayat kerjasama. Bentuk kepemimpinan fasilitatif ditunjukkan oleh Kepala Dinas DPKP3, Rektor ITB beserta jajaran staff di bidang sarana dan prasarana selaku penguasa dan pengelola taman. Bentuk kelembagaan tertuang dalam aturan yang berlaku. Pada proses kolaborasi yang dilakukan terdapat empat tahapan diantaranya :

a. *face to face dialogue*

Pada tahap pertama proses kolaborasi terdapat dialog tatap muka diprakarsai Dinas Penataan Ruang, Bagian Kerjasama Pemkot Bandung, BAPPELITBANG, DPKP3, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta tidak lupa Institut Teknologi Bandung.

b. *trust building*

Dalam membangun kepercayaan melalui partisipasi, Intitut Teknologi Bandung (ITB) memiliki peran dalam pengelolaan taman secara operasional yang dimana memiliki tugas untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sedangkan Pemerintah Kota Bandung melalui DPKP3 berpartisipasi selaku fasilitator yakni meningkatkan peran serta perguruan tinggi dan dunia usaha dalam menunjang lifeskill education.

c. *commitment to process*

DPKP3 melakukan controlling terhadap kondisi taman, sedangkan dari pihak ITB berupaya menyediakan upaya pendukung taman seperti pedestrian, tangga, papan nama, tempat sampah, sculpture, bangku taman, lampu taman, kolam, shelter. Controlling taman dilakukan setiap hari agar keindahan dan kerapihan taman tetap terjaga.

d. *shared understanding*

Taman Ganesha juga berperan dalam peningkatan fungsi ekologis dan fungsi rekreasi bagi sebuah taman. Fungsi ekologis berperan meningkatkan atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu perkotaan, dan meredam kebisingan. Selain itu fungsi rekreasi Taman Ganesha merupakan wadah bagi masyarakat untuk bergerak

aktif dalam ruang terbuka. Seperti diketahui Taman Ganesha dijadikan tempat beraktivitas oleh masyarakat, mahasiswa, ataupun komunitas disekitar lingkungan taman tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk penyediaan ruang terbuka hijau melalui *collaborative governance* (studi pada taman ganesha).

Pemerintah memegang peranan utama dan turut serta dalam upaya menambah persentase ruang terbuka hijau dengan melakukan kolaborasi bersama stakeholders lainnya. Kolaborasi tiga sektor yang terbentuk sudah cukup baik namun kurang maksimal. Selama ini kolaborasi masih bersifat semiformal dalam arti belum ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Bandung dan Institut Teknologi Bandung. Aturan yang ada merupakan aturan dari masing-masing instansi yang sifatnya internal organisasi dan belum mengikat secara utuh, namun dalam praktiknya kolaborasi dapat berjalan dalam mencapai tujuan yang sama. Aturan kerjasama perlu ditingkatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Untuk masyarakat pengunjung taman hendaknya menjaga kebersihan serta fasilitas yang ada, mengingat banyak manfaat yang dapat diambil dari Taman Ganesha. Fungsi ekologis dan fungsi rekreasi dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan positif seperti program bersih taman dan penanaman kembali vegetasi yang ada agar Taman Ganesha tetap menjadi paru-paru Kota Bandung.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuan kepada peneliti dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi.
3. Bapak Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP selaku dosen penguji skripsi.
4. Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., M.PA selaku dosen penguji skripsi.
5. Pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan secara moral dan finansial kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselamatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrahan, dkk. 2012. Fungsi Taman Kota Metro Sebagai Ruang Terbuka Publik Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Geografi*. 1-12. (online), (<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/view/5700>, diunduh pada 18 Januari 2020)
- Aneta, Asna, dkk. 2018. Institutional Problem In Regional Public Services. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*. 79-86. (online), (<https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/7877>, diunduh pada 19 Januari 2020)
- Arafat, Gusti Yasser. 2018. Membongkar isi Pesan Media dengan Content Analysis. *Jurnal Alhadharah*. 32-48. (online), (<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2370/1687>, diunduh pada 20 Juni 2020)
- Ansell, Chris & Gash, Allison. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 543-571. (online), (<https://sites.duke.edu/niou/files/2011/05/Ansell-and-Gash-Collaborative-Governance-in-Theory-and-Practice.pdf>, diunduh pada 17 Januari 2020)
- BBC. 2019. Perubahan Iklim: Dunia sedang mengalami dekade terhambat sejak 1850. (online), (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47153717>, diunduh pada 17 Januari 2020)
- Dahlstorm, Timothy R. 2013. Telecommunicating and Leadership Style. *Public Personnel Management*. (online), (https://www.academia.edu/download/34560507/Telecommuting_and_Leadership_Publishe-d-Dahlstrom_2013.pdf 438-451, diunduh pada 25 Mei 2020)
- Dataset Kota Bandung. Kerjasama Pemerintah Kota Bandung Bidang Lingkungan. 2019. (Online), (<http://data.bandung.go.id/dataset/csr-kota-bandung-bidang-lingkungan/resource/3873334d-eaac-475b-ba8c-b3ae34441a3e>, diunduh pada 17 Januari 2020)
- Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pekerjaan Umum. 2016. 8 Atribut Green City. (online), (<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/mengenal-8-atribut-kota-hijau>, diunduh pada 17 Januari 2020)
- Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pekerjaan Umum. 2016. Program Pengembangan Kota Hijau. (Online), (<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/explore>, diunduh pada 4 februari 2020)
- Gitsham, Matthew & Page, Natasha. 2014. Designing Effective Multy-Stakeholder Collaboration Platform: Learning From The Experiences Of The UN Global Compact Lead Initiative. *SAM Advances Management Journal*. 18-28 (online), (<https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA398523878&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=07497075&p=AONE&sw=w>, diunduh pada 20 Juni 2020)
- Fanani, Abdul Fatah. 2020. Kepemimpinan Transformasional Sektor Publik. *Journal Of Public Sector Innovation*. 84-90. (online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/8132>, diunduh pada 10 Juli 2020)
- Harmawan, B. N, et. al. 2017. Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. *E-SOSPOL*. 50-55. (online), (<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/5615>, diunduh pada 20 Juni 2020)
- Imron, Muhammad. 2020. Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan. *Journal Of Public Sector Innovation*. 68-74. (online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/7952>, diunduh pada 10 Juli 2020)
- ITB. 2020. Sejarah Institut Teknologi Bandung. (online), (<https://www.itb.ac.id/sejarah>, diunduh pada 10 Juli 2020)
- Kustianingrum, dkk. 2013. Fungsi dan Aktivitas Taman Ganesha Sebagai Ruang Publik di Kota Bandung. *Jurnal Reka Karsa*. 1-14. (online), (<https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekakarsa/article/view/260>, diunduh pada 25 Januari 2020)

- Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung tahun 2012-2032
- Nururrohmah, Z& Suhirman. (2016). Sharedpower Governance in Managing Common Pool Resources Case Study: Collaborative Planning to Manage Thematic Parks in Bandung City, Indonesia. *Procedia - Socialand Behavioral Sciences*. 465-476. (online), (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281630787X>, diunduh pada 11 Juli 2020)
- Patzer, dkk. 2018. The Normative Justication of Integrative Stakeholder Engagement: A Habermasian View on Responsible Leadership. *Zurich Open Repository and Archive*. 1-49. (online), (https://www.up.ac.za/media/shared/213/Articles%20on%20RL/Batch%204/normative_justification_of_integrative_stakeholder_engement_a_habermasian_view_on_responsible_leadership.zp143796.pdf, diunduh pada 22 Juni 2020)
- Peraturan Daerah Kota Bandung No.07 tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung No.189/PER/Ii.A/SP/2018 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi, dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung PTNBH
- Peraturan Walikota Bandung No. 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPKP3 Kota Bandung
- Reilly, Thom. 2001. Collaboration in action: An uncertain process. *Administration in Social Work*. 53-73. (online), (https://dx.doi.org/10.1300/J147v25n01_06, diunduh pada 25 Mei 2020)
- Ridwan, Muhammad. 2019. Evaluasi Jalur Sukajadi Sejumlah Taman Akan Dibongkar. (online), (<https://nasional.republika.co.id/berita/q0upxe335/evaluasi-jalur-sukajadi-sejumlah-tamanakandibongkar>, diunduh pada 17 Januari 2020)
- Rosadi, Dian. 2019. Pemkot Bandung Anggarkan Rp38 Miliar Untuk Pemeliharaan Taman. (online),<https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/pemkot-bandung-anggarkan-rp38-miliar-untuk-pemeliharaan-taman-190424s.html>, diunduh pada 9 Juli 2020)
- Selsky, John W & Parker, Barbara. 2005. Cross Sector Partnership to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice. *Journal of Management*. 849-873. (online), (<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0149206305279601>, diunduh pada 26 Mei 2020)
- Sintaningrum, dkk. 2017. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Taman Kota Di Kota Bandung. *Hibah Penelitian Fakultas*. 1-19. (online), (<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/027-Persepsi-Masyarakat-Terhadap-Pengelolaan-Taman-Kota.pdf>, diunduh pada 11 Juli 2020)
- Shahzad Umair. 2015. Global Warming: Causes, Effects, and Solutions. *Dureesamin Journal*. 1-7. (online), (https://www.researchgate.net/publication/316691239_Global_Warming_Causes_Effects_and_Solutions/link/590ca678aca2722d185bff31/download), diunduh pada 17 Januari 2020)
- Sufianti, Ely, dkk. 2018. Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi pada Masyarakat Nonkolaboratif. *MIMBAR*. 133-144. (online), (<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/390>, diunduh pada 25 Mei 2020)
- Tribun Jabar. 2017. Jalan Arjuna Akan Ditutup Untuk Perayaan Tahun Baru di Alun-Alun Cicendo, Ini Jadwal Penutupannya. (online), (<https://jabar.tribunnews.com/2017/12/30/jalan-arjuna-akan-ditutup-untuk-perayaan-tahun-baru-di-alun-alun-cicendo-ini-jadwal-penutupannya>, diunduh pada 10 Juli 2020)
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang No.26 tahun 2007 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Widyahantari, Rani & Rudiarto, Iwan. 2018. Kapasitas Pemerintah Kota Bandung Dalam Penyediaan Taman Tematik Guna Mewujudkan Kota Layak Huni. *Jurnal Pengembangan Kota*. 9-16. (online), (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/2930>, pada 10 Juli 2020)